

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN DAN DETEKSI FRAUD DI PERGURUAN TINGGI

Novita Putri

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang

Email : Novitap140@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. Sebanyak 17 jurnal penelitian digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Audit internal berperan sangat penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan serta dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi. Audit internal berjalan dengan baik jika manajemen universitas mengadopsi kebijakan yang mendorong peran dan independensi terbesar audit internal di dalam universitas.

Kata kunci : audit internal; mencegah fraud; mendeteksi fraud

ABSTRACT

This study uses a library research method by collecting several journals related to the research title. A total of 17 research journals were used as references in this study. Internal audit plays a very important role in preventing and detecting fraud and can minimize fraud that occurs. Internal audit works best if university management adopts policies that encourage the greatest role and independence of internal audit within the university.

Keywords : internal audit; preventing fraud; detecting fraud

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Peran perguruan tinggi sebagai pusat pembelajaran, serta pengembangan dan transformasi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh karena itu memerlukan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan tinggi. Manajemen perguruan tinggi harus terus berbenah guna memperkuat dan lebih mengembangkan mutu pendidikan.

Menurut informasi dari catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) dari 2016 hingga 2021, korupsi di perguruan tinggi telah terjadi. Artinya, ada 20 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, sehingga merugikan pemerintah total sebesar Rs 789,8 crore (Sjafrina dan N 2021). Penipuan universitas yang umum terjadi adalah penipuan dana penelitian, penipuan pengadaan barang dan jasa, penipuan hibah, kutipan intra universitas, dan penipuan beasiswa. Tanda-tanda kecurangan adalah adanya

anomali akuntansi yang ditandai dengan buruknya penganggaran atau keterlambatan pencairan dana yang dapat menimbulkan transaksi fiktif (Fitriyah 2016). Korupsi dalam pendidikan juga dapat berbentuk korupsi birokrasi di mana pegawai dibayar untuk memfasilitasi proses kerja tertentu atau menunda penyelidikan disipliner. Ini termasuk kegagalan untuk memberikan informasi bila diperlukan, penyalahgunaan sumber daya pemerintah, penggunaan dokumen palsu, dipalsukan atau diubah, penyuaipan atau korupsi, dan penyalahgunaan informasi pemerintah atau kekayaan intelektual. Peran audit internal sangat penting untuk menemukan dan mencegah penipuan di universitas. Strategi pencegahan dan deteksi penipuan yang efektif mendukung semua lembaga secara finansial, mendekatkan anggota, dan meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Kultanen 2017). Kehadiran SPI dalam pendeteksian dan pencegahan fraud tidak lepas dari keterlibatan pimpinan perguruan tinggi, yang tanpanya apa yang dilakukan oleh SPI tidak akan berjalan dengan baik (Harwida Gita Arasy 2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Audit internal

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pengendalian intern, yaitu Keputusan No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Untuk melaksanakan undang-undang ini, Kementerian Pendidikan Nasional telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sama halnya dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 1 (1) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang utuh. Verifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pengelolaan kegiatan, perlindungan aset dan harta benda, pelaksanaan pelaporan keuangan yang tepat, peningkatan efektivitas dan efisiensi, mendeteksi kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum; Penilaian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya secara dini pada. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dimaksudkan untuk menjadi unit strategis bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Tujuan dan peran SPI sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen berfungsi dengan baik dan bebas dari kecurangan. Salah satu

bentuk penerapan pengendalian internal dalam suatu organisasi adalah audit internal. The Institute of Internal Audit (2009) mendefinisikan audit internal sebagai bentuk audit internal independen yang dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari audit dan penilaian organisasi (2009) Institute of Internal Audit 2009). Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengendalian internal ini, antara lain: B. Keahlian yang terbatas, staf yang tidak memenuhi syarat, campur tangan manajemen dengan pengendalian internal yang telah ditetapkan, tunjangan karyawan yang tidak memadai, kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem yang ada, kelalaian, pengawasan yang tidak memadai, Tidak adanya pemisahan tugas merupakan hambatan bagi penerapan sistem pengendalian internal yang efektif (Ojua 2016) . Audit internal juga harus diberdayakan untuk melaksanakan tugasnya, dan sangat penting bahwa itu independen dari manajemen. Hal ini sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa “khawatir atau memihak” (Ghazali et al. 2014). Lebih jauh lagi, aktivitas ini tidak boleh dilihat secara ketat sebagai aktivitas yang menghasilkan biaya, melainkan dalam hal manfaat yang diperoleh untuk memerangi penipuan, terutama peningkatan penciptaan nilai di masa depan (Petraşcu dan Tianau 2014).

Fraud

Fraud adalah pengetahuan keliru tentang kebenaran atau penyembunyian fakta material untuk mendorong orang lain bertindak yang merugikan (H.C 1990). Kecurangan (*Fraud*) hampir disemua bagian organisasi yaitu dilakukannya kesengajaan dalam membuat kecurangan penyimpangan dari prosedur akuntansi,. Dalam teori *fraud Triangle* yang dikembangkan oleh (Cressey 1953), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu; (1) *Pressure* atau tekanan, (2) *Oportunity* atau kesempatan, (3) *Rationalization* atau pembenaran. Berdasarkan studi penelitian tentang topologi fraud, muncul beberapa kategori. Satu tipologi mencirikan penipuan seperti : (a) penggelapan, (b) penipuan manajemen, (c) penipuan akuntansi, (d) penipuan vendor, dan (e) pelanggan curang (Zulkarnaen, W., et al. 2020:2487)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan penipuan menjadi tiga jenis berdasarkan perilakunya. Penggunaan aset secara tidak sah, termasuk penggunaan/pencurian aset milik kami atau pihak lain tanpa izin. Ini adalah yang paling mudah ditemukan karena sifatnya yang jelas atau nilainya yang pasti. (2) Deskripsi yang salah. Pernyataan penipuan terdiri dari tindakan dan tindakan yang dilakukan oleh

eksekutif atau pejabat suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan komersial untuk menyamarkan status keuangan mereka yang sebenarnya melalui manipulasi keuangan. (3) Korupsi. Jenis penipuan ini paling sulit dideteksi karena bekerja sama dengan pihak lain. Korupsi adalah bentuk penipuan yang paling umum di negara berkembang, di mana penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik mengancam integritas. Penipuan semacam ini seringkali tidak terdeteksi karena semua pihak yang terlibat dalam persekongkolan menikmati keuntungan seperti: B. Timbal Balik Simbiotik. Jenis ini mencakup konflik kepentingan, penyuapan, keuntungan ilegal, dan pemerasan keuangan. Asumsi bahwa laporan keuangan tidak curang sangat penting untuk keyakinan bahwa auditor memiliki bukti audit independen yang mendukung informasi akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Namun, ada banyak bukti bahwa konspirasi penipuan ada di dunia nyata, bahwa seringkali ada motivasi kuat untuk terlibat dalam konspirasi penipuan, dan bahwa konspirasi memengaruhi laporan keuangan. Peretasan, pemalsuan, dan pemalsuan menimbulkan risiko serupa dari misrepresentasi yang menyimpang (Dai dan Handley-Schachler 2015).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan literature review berbasis penelitian yang diterbitkan dalam jurnal penelitian, termasuk hingga 17 artikel jurnal tentang peran audit internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan di perguruan tinggi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, membandingkan dan menganalisis penelitian sebelumnya tentang audit internal perguruan tinggi untuk pencegahan dan deteksi penipuan.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud

Kasus-kasus *fraud* yang semakin merajalela disetiap lini lingkungan akademik menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perguruan tinggi. Pendeteksian merupakan langkah awal untuk melangkah ke pencegahan kecurangan. Tidak ada organisasi yang kebal terhadap penipuan. Penipuan akan terus terjadi tidak peduli seberapa keras kita berusaha mencegah dan menahannya. Terlepas dari upaya terbaik manajemen puncak untuk memerangi penipuan, selain meningkatkan kesadaran karyawan tentang aktivitas yang dapat dianggap sebagai penipuan dan solusi yang

diperlukan untuk mencegah dan mendeteksinya, Tidak ada solusi nyata untuk penipuan (Rahman dan Anwar 2014). Strategi pencegahan dan pendeteksian penipuan yang efektif membantu seluruh organisasi secara finansial dan mendekatkan anggota. Salah satu strategi anti Fraud adalah kombinasi antara strategi represif (tindakan) dan preventif (pencegahan), kompensasi yang wajar yang memenuhi kebutuhan karyawan, dan kompensasi yang wajar dan transparan bagi seluruh karyawan sesuai dengan fungsi kompensasi Standar hidup (Purnamasari dan Amalia 2015). Pencegahan dan deteksi sedini mungkin dapat meminimalkan kerugian. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Kultanen 2017). Oleh sebab itu, manajemen di perguruan tinggi harus mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya fraud agar kerugian tidak bertambah. Jika CPA menemukan penipuan sisi klien, ia berkewajiban untuk mengungkapkannya sebagai bagian dari pekerjaannya (Badjuri 2010). Akibatnya, deteksi dan pencegahan penipuan cepat dan tegas, sehingga Anda dapat mengambil tindakan segera. Kebijakan anti-penipuan yang jelas mengenai bagaimana dan kepada siapa melaporkan penipuan diperkuat dengan tidak adanya jaminan perlindungan bagi pelapor (Rorwana, Tengeh, & Musikavanhu 2015). Hal ini menimbulkan tantangan bagi manajemen puncak untuk menetapkan kebijakan anti-penipuan yang tepat. Manajemen puncak harus mampu menciptakan kesadaran serta pemahaman budaya anti korupsi pada seluruh elemen dalam organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan (Jalil 2018). Adanya sistem pengendalian intern (SPI) untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud tidak terlepas dari komitmen manajemen universitas (Harwida Gita Arasy 2015). Menurut penelitian (Zamzami, Duta Nusa, Timur 2016), metode deteksi dan pencegahan fraud yang paling efektif adalah audit, review dan perbaikan pengendalian internal, audit kas, dan sanksi kode terhadap pemasok/kontraktor dan petugas etika. Lima metode pencegahan dan pendeteksian penipuan yang paling tidak efektif adalah antivirus, indikator keuangan, firewall, perangkat lunak pemfilteran, dan mempekerjakan akuntan forensik perusahaan. Setelah dilakukan audit internal, plausibility check dinilai sudah cukup untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi (Putri, Syariati dan Ahmad 2021). Anggota diharapkan tidak berperilaku tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif (Marciano et al. 2021). Selain itu,

situs web harus digunakan untuk membenarkan akuntabilitas publik dan meningkatkan transparansi prosedur akuntansi dan kebijakan pengadaan (Joseph et al. 2021). Beberapa berpendapat bahwa implikasi antropologis korupsi yang timbul dari meningkatnya infiltrasi universitas oleh industri pajak yang semakin komersial bahkan tidak dapat diandalkan untuk mengatur dirinya sendiri. Meningkatnya keterlibatan kantor akuntan dalam kegiatan non-audit, termasuk layanan anti korupsi, menunjukkan bagaimana narasi korupsi bekerja sebagai strategi pembentuk pasar (Shore 2018). Ketersediaan situs web publik universitas menyediakan cara untuk mengkomunikasikan upaya antikorupsi kepada pemangku kepentingan di dalam dan di luar universitas (Joseph et al. 2021). Kebijakan *whistle-blowing*, *hotline* penipuan, dan akuntan forensik. kurang umum digunakan. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memperbanyak *hotline* penipuan, meningkatkan *whistleblowing* kebijakan dan mendirikan departemen akuntansi forensik di sektor publik untuk meningkatkan pencegahan penipuan mekanisme di sektor publik (Othman et al. 2015).

KESIMPULAN

Audit internal memiliki peran sangat penting dalam pencegahan kecurangan. Setiap elemen dari perguruan tinggi apabila melaksanakan audit internal maka mencegah dan mendeteksi fraud akan berjalan dengan baik di perguruan tinggi. Kebijakan yang diambil oleh pimpinan tertinggi mempunyai dampak besar terhadap berjalan atau tidaknya audit internal untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Serta pentingnya kesadaran dalam penipuan mendorong kesiapsiagaan dalam mendeteksi dan menindaklanjuti kecurangan disetiap bagian perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Association Certified Fraud Examiner (ACFE). 2012. Report to the Nations on Occupational Fraud. Albrecht A., C C Albrecht, C O Albrecht, & M F Zimbelman. 2009. Fraud Examination. Third Edition. Thomson/South-Western.
- (2009) Institute of Internal Audit. 2009. *Practice Guide: Internal Auditing and Fraud*.
- Badjuri, Achmad. 2010. "Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit." *Fokus Ekonomi* 9(3): 194–204.
- Cressey, Donald R. 1953. *Others People Money, A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith.
- Dai, Yun, and Morrison Handley-Schachler. 2015. "A Fundamental Weakness in Auditing: The Need for a Conspiracy Theory." *Procedia Economics and Finance* 28(April): 1–6. [http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01074-6](http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01074-6).
- Fitriyah, Fury Khristianty. 2016. ""The Role Of The Internal Audit Unit in Detecting and Preventing Fraud at Public Universities in West Java." *International Journal of Economics and Management Engineering* 10: 5.

- Ghazali, Mohamad Zulkurnai, Mohd Syahrir Rahim, Azharudin Ali, and Shamharir Abidin. 2014. "A Preliminary Study on Fraud Prevention and Detection at the State and Local Government Entities in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164(August): 437–44. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.100>.
- H.C, Black. 1990. *Black Law Dictionary, 6th Ed. St. Paul*. 6th St. Pa. Minnesota: West grup.
- Harwida Gita Arasy. 2015. "MENGULIK PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MELAKUKAN DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD DI PERGURUAN TINGGI." *infestasi* 11(1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1123> (February 24, 2022).
- Jalil, Fitri Yani. 2018. "Internal Control, Anti-Fraud Awareness, and Prevention of Fraud." *ETIKONOMI* 17(2): 297–306.
- Joseph, Corina et al. 2021. 20 MANAGEMENT AND ACCOUNTING REVIEW *A Comparison of Online Fraud Prevention Disclosure in Malaysian and Indonesian Public Universities*.
- Kultanen, Elina. 2017. Thesis Business Administration, Financial Management "Prevention and Detection of Fraud in a Ugandan University Organization."
- Marciano, Benny, Ardiansyah Syam, Suyanto, and Nurmala Ahmar. 2021. "Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review." *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* 20(2): 130–37.
- Ojua, Michael Olusegun. 2016. *Internal Controls and Fraud Prevention in Non-Profit Organizations: A Survey of Selected Churches in Lagos, Nigeria Internal Controls and Fraud Prevention among Non-Profit Organizations: A Case of Nigerian Churches View Project THE INTERNATIONAL JOURNAL OF*. www.theijbm.com.
- Othman, Rohana et al. 2015. "Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions." *Procedia Economics and Finance* 28(April): 59–67. [http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01082-5](http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01082-5).
- Petraşcu, Daniela, and Alexandra Tleanu. 2014. "The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection." *Procedia Economics and Finance* 16(May): 489–97.
- Purnamasari, Pupung, and Ima Amaliah. 2015. "Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211(September): 827–35.
- Putri, Dhika Maha, Dian Syariati, and Arisona Ahmad. 2021. "FRAUD PREVENTION IN THE PERSPECTIVE OF PROBITY AUDIT (THE CASE STUDY OF UNIVERSITY X)." 12(2).
- Rahman, Rashidah Abdul, and Irda Syahira Khair Anwar. 2014. "Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Techniques in Malaysian Islamic Banks." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145: 97–102. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.015>.
- Rorwana, Amelia, Robertson Tengeh, and Tichaona Musikavanhu. 2015. "A Fraud Prevention Policy: Its Relevance and Implication at a University of Technology in South Africa." *Journal of Governance and Regulation* 4(3): 212–21.
- Shore, Cris. 2018. "How Corrupt Are Universities? Audit Culture, Fraud Prevention, and the Big Four Accountancy Firms." *Current Anthropology* 59(S18): S92–104.
- Sjafrina, Almas G P, and Dewi Anggraeni P N. 2021. *Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi*.
- Zamzami, Faiz, Nabella Duta Nusa, and Rudi Prasetya Timur. 2016. "Special Issue

For.” *International Journal of Economics and Financial Issues* 6(S3): 5–6.
<http://www.econjournals.com>.

Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2471–2491.
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894>.